

---

# Implementasi Program Anti-Korupsi dalam Administrasi Publik: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

**IKHWAN PRAMANA SYUHADA**

*Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia*

---

## **Abstrak**

*Korupsi adalah salah satu isu paling signifikan yang mengganggu administrasi publik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ia tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan menciptakan ketidakadilan sosial. Dalam upaya untuk memberantas fenomena ini, banyak negara telah mengembangkan dan mengimplementasikan program anti-korupsi yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelayanan publik. Namun, keberhasilan dari program-program ini tidak selalu dapat dijamin.*

*Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program anti-korupsi dalam administrasi publik. Di antara faktor-faktor tersebut, komitmen politik yang kuat dari pemimpin pemerintahan menjadi sangat krusial, karena tanpa dukungan politik, inisiatif anti-korupsi sulit untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan dan penerimaan dari seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting; masyarakat yang terlibat dalam proses pengawasan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.*

*Kelembagaan yang kuat, seperti lembaga anti-korupsi yang independen, memainkan peran sentral dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi modern dapat meningkatkan aksesibilitas data dan informasi kepada masyarakat, sehingga memudahkan pengawasan terhadap kebijakan publik dan penggunaan anggaran.*

*Melalui pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor ini, artikel ini berupaya memberikan wawasan strategis tentang bagaimana mengoptimalkan implementasi program anti-korupsi untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam upaya memberantas korupsi di sektor publik.*

---

**Kata Kunci:** *Anti-Korupsi, Implementasi Program, Kebijakan Publik, Program Pemerintah, Pengawasan*

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

*Korupsi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini telah merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik, menciptakan ketidakadilan dan menghambat pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam konteks global, korupsi tidak hanya berakibat pada kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Menurut Transparency International, korupsi mencakup berbagai tindakan yang merugikan masyarakat, seperti suap, penggelapan, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menandakan bahwa korupsi bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan persoalan sistemik yang melibatkan berbagai elemen dalam administrasi publik.*

*Di Indonesia, kasus korupsi terus muncul dalam berbagai bentuk dan sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga pengelolaan dana pemerintah. Lembaga Anti-Korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah berperan penting dalam menindak kasus-kasus korupsi, namun tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Masyarakat sering kali merasa frustrasi dengan tindakan korupsi yang terus terjadi, sementara institusi yang seharusnya melindungi kepentingan publik kadang-kadang justru terlibat dalam praktik-praktik korupsi itu sendiri.*

*Dalam upaya untuk memerangi korupsi, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif anti-korupsi. Salah satu langkah penting adalah memperkuat regulasi dan kerangka hukum yang ada, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, keberhasilan dari program-program ini tidak hanya tergantung pada kebijakan yang ditetapkan, tetapi juga pada implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program anti-korupsi dalam administrasi publik.*

*Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program anti-korupsi adalah komitmen politik. Tanpa dukungan dari pemimpin pemerintahan, inisiatif anti-korupsi sulit untuk dilaksanakan dengan efektif. Komitmen politik yang kuat dapat mendorong alokasi sumber daya yang diperlukan dan menciptakan kebijakan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Pemimpin yang menunjukkan integritas dan ketegasan dalam melawan korupsi dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan institusi pemerintahan.*

*Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan program anti-korupsi. Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengawasan dan evaluasi program anti-korupsi dapat memberikan masukan yang berharga dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang diambil. Keterlibatan masyarakat dapat membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan korupsi di tingkat lokal.*

*Kelembagaan yang kuat juga merupakan prasyarat untuk keberhasilan program anti-korupsi. Lembaga yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dengan lebih efektif. Di Indonesia, KPK telah berperan sebagai lembaga utama dalam pemberantasan korupsi, tetapi lembaga ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan politik dan keterbatasan sumber daya.*

*Selain faktor-faktor di atas, pemanfaatan teknologi informasi juga memainkan peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan menggunakan teknologi modern, pemerintah dapat meningkatkan akses informasi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta layanan publik. Sistem e-government, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk mengawasi proses pengadaan dan penggunaan dana publik, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya praktik korupsi.*

*Dalam artikel ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program anti-korupsi dalam administrasi publik. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai strategi yang dapat diambil untuk mengoptimalkan program-program ini dan mencapai hasil yang diinginkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait, upaya untuk memerangi korupsi dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.*

## **Pembahasan**

### **1. Komitmen Politik**

*Komitmen politik merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program anti-korupsi. Tanpa dukungan yang kuat dari pemimpin politik, inisiatif anti-korupsi cenderung mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Pemimpin yang memiliki integritas dan visi yang jelas untuk memberantas korupsi akan mampu mendorong berbagai kebijakan dan program yang mendukung upaya ini. Misalnya, ketika seorang*

*presiden atau gubernur secara tegas menyatakan bahwa korupsi tidak akan ditoleransi, hal ini dapat memberikan sinyal kuat kepada semua jajaran pemerintahan untuk melaksanakan program anti-korupsi secara serius.*

*Pentingnya komitmen politik juga tercermin dalam alokasi sumber daya. Program anti-korupsi memerlukan dana, tenaga kerja, dan infrastruktur yang memadai untuk dapat diimplementasikan dengan efektif. Ketika pemimpin politik berkomitmen untuk memberantas korupsi, mereka akan memastikan bahwa anggaran yang diperlukan untuk lembaga-lembaga anti-korupsi, seperti KPK, disediakan. Selain itu, dukungan politik juga akan berpengaruh pada kebijakan reformasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik.*

*Namun, tantangan sering kali muncul ketika pemimpin politik terlibat dalam praktik korupsi itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, program anti-korupsi bisa terhambat, bahkan dibatalkan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin politik mereka.*

## **2. Partisipasi Masyarakat**

*Partisipasi masyarakat merupakan komponen krusial dalam keberhasilan program anti-korupsi. Masyarakat yang aktif dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan publik dapat memberikan tekanan pada pemerintah untuk bertindak transparan dan akuntabel. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya menciptakan rasa kepemilikan, tetapi juga memberikan legitimasi bagi kebijakan yang diambil.*

*Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas independen melalui organisasi non-pemerintah (LSM), komunitas, atau kelompok advokasi. LSM yang fokus pada isu anti-korupsi seringkali melakukan kampanye kesadaran, melatih masyarakat tentang hak-hak mereka, dan memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk melaporkan tindakan korupsi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemantauan anggaran juga penting. Dengan adanya pemantauan dari masyarakat, penggunaan dana publik dapat lebih transparan, sehingga meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan.*

*Sebagai contoh, program e-budgeting yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas. Melalui aplikasi atau platform online, masyarakat dapat melihat bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan*

kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran terhadap penggunaan anggaran.

### **3. Kelembagaan yang Kuat**

*Kelembagaan yang kuat dan independen sangat penting untuk mendukung keberhasilan program anti-korupsi. Lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas, integritas, dan independensi yang tinggi dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Dalam konteks Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi, namun lembaga ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan.*

*KPK dibentuk dengan tujuan untuk memberantas praktik korupsi yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Namun, keberadaan KPK sering kali terancam oleh tekanan politik dan upaya delegitimasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat dan lembaga internasional sangat penting untuk menjaga independensi KPK dan memastikan bahwa lembaga ini dapat berfungsi secara optimal.*

*Selain KPK, penting juga untuk memperkuat lembaga lain yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ombudsman. Kelembagaan yang saling berkolaborasi dan mendukung satu sama lain akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan komprehensif.*

### **4. Teknologi Informasi**

*Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi publik telah terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan kemajuan teknologi, pemerintah dapat menyediakan akses informasi yang lebih baik kepada publik. Sistem e-government, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik dengan lebih mudah dan cepat. Dengan demikian, informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan proses pengadaan dapat diakses oleh masyarakat luas.*

*Salah satu contoh sukses dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah pengembangan aplikasi mobile dan platform online untuk melaporkan tindakan korupsi. Masyarakat dapat melaporkan kasus korupsi secara anonim dan mudah, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan. Selain itu, teknologi juga dapat*

*digunakan untuk melacak aliran dana publik, memonitor proyek-proyek pemerintah, dan menganalisis data untuk mengidentifikasi potensi korupsi.*

*Penggunaan teknologi dalam pemerintahan tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki akses terhadap informasi yang transparan, mereka akan lebih percaya pada integritas pemerintah dan lebih bersedia untuk terlibat dalam upaya pencegahan korupsi.*

## **5. Pendidikan dan Kesadaran Hukum**

*Pendidikan dan kesadaran hukum memainkan peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang peka terhadap isu korupsi. Pendidikan mengenai korupsi dan dampaknya harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dengan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam pemerintahan, masyarakat akan lebih mampu mengenali tindakan korupsi dan melaporkannya.*

*Selain pendidikan formal, kampanye kesadaran hukum yang melibatkan media, seminar, dan diskusi publik juga penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang korupsi. Masyarakat yang sadar akan hak-haknya akan lebih berani menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Ini juga termasuk meningkatkan pengetahuan tentang mekanisme pelaporan dan lembaga yang dapat dihubungi jika terjadi tindakan korupsi.*

*Pendidikan yang baik tidak hanya akan menciptakan individu yang teredukasi, tetapi juga masyarakat yang kritis dan aktif dalam mengawasi pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang menolak praktik korupsi.*

## **6. Kolaborasi Internasional**

*Korupsi adalah masalah lintas negara yang sering kali memerlukan kerjasama internasional untuk diatasi. Negara-negara perlu berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memberantas korupsi. Kerjasama internasional dapat mencakup pertukaran data mengenai kasus-kasus korupsi, pelatihan bagi pegawai pemerintah, serta bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas lembaga anti-korupsi.*

*Organisasi internasional, seperti PBB, World Bank, dan Transparency International, juga berperan penting dalam mendukung negara-negara dalam upaya pemberantasan korupsi. Mereka dapat memberikan dukungan dalam bentuk dana, pelatihan, dan sumber daya lainnya untuk memperkuat program-program anti-korupsi di negara-negara berkembang.*

*Kerjasama internasional juga memungkinkan negara-negara untuk menangani pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Dengan adanya perjanjian ekstradisi dan kerjasama hukum, negara dapat bekerja sama untuk menangkap dan mengadili pelaku korupsi, sehingga menimbulkan efek jera bagi calon pelaku korupsi di masa mendatang.*

## **Kesimpulan**

*Implementasi program anti-korupsi dalam administrasi publik adalah langkah vital untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Melalui analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa elemen kunci yang harus diperhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pemberantasan korupsi.*

*Pertama, komitmen politik yang kuat dari para pemimpin pemerintahan menjadi syarat utama. Tanpa dukungan politik, kebijakan anti-korupsi sulit untuk dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, pemimpin yang memiliki integritas dan berani bertindak tegas dalam melawan korupsi dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan jajaran pemerintahan lainnya. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan publik sangat penting. Keterlibatan masyarakat menciptakan rasa kepemilikan terhadap program anti-korupsi dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana publik. Masyarakat yang teredukasi mengenai hak dan kewajiban mereka akan lebih berani melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekeliling mereka.*

*Selanjutnya, keberadaan kelembagaan yang kuat dan independen sangat krusial untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Lembaga anti-korupsi seperti KPK perlu didukung untuk menjaga independensinya agar dapat beroperasi secara efektif.*

*Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan faktor yang tidak boleh diabaikan. Dengan penggunaan teknologi, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.*

*Akhirnya, kolaborasi internasional dalam pemberantasan korupsi sangat penting untuk menciptakan jaringan global yang saling mendukung. Dengan bekerja sama, negara-negara dapat saling bertukar informasi dan praktik terbaik dalam mengatasi korupsi, serta menangkap pelaku korupsi yang melarikan diri.*

*Secara keseluruhan, pendekatan yang komprehensif dan sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan untuk memerangi korupsi*

*secara efektif. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan administrasi publik yang bersih dan berintegritas, serta mewujudkan harapan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Hidayat, T. W. (2023). *Analisis Semiotika pada Film Yowis Ben 3 dalam Qualisign, Sinsign dan Legisign*.
- Nasution, I., & Hasibuan, M. A. (2012). *Pembinaan Pegawai Pemerintahan dalam Pelaksanaan Tugas-tugas Organisasi di Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang*.
- Muda, I., & Masitho, B. (2019). *Peranan Fraksi Partai Demokrat dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Harahap, Y., & Ritonga, S. (2007). *Fungsi Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rafiqah, M. O., & Nasution, I. (2015). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Disiplin Mengajar Guru Sma Yayasan Perguruan Swasta Kesatria Medan*. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 3(2), 126-132.
- Lubis, M. S. (2002). *Arah Otonomi Daerah (Suatu Analisa dan Tinjauan)*.
- Tarigan, U. (2005). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Kota Binjai*.
- Nasution, I. (2013). *Sistem Pengamanan Fasilitas Pemerintah dalam Pemilu di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Nasution, I., & Harahap, Y. (2011). *Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*.
- Tampubolon, N., & Ritonga, S. (2004). *Peranan Kantor Catatan Sipil Dalam Pelaksanaan Tugas-Tugas Pemerintahan di Bidang Kependudukan (Studi Pada Kantor Catatan Sipil Kota Binjai) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Simatupang, I. (2003). *Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja di PT Atmindo Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Ritonga, S. (2024). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengekoordinasian dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Petisah*.
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2005). *Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur*.
- Harahap, M. Y., & Ritonga, S. (2007). *Peranan Keteladanan Camat Selaku Pimpinan dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*.
- Lubis, M. S. (2001). *Peran Dan Fungsi Kelurahan Dalam Kerangka Pelayanan Kepada Masyarakat Dalam Struktur Pemerintahan Daerah*.
- Angelia, N., & Batubara, B. M. (2022). *Peranan Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Simatupang, I. (2004). *Pelaksanaan Pembinaan dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2013). *Analisis Tupoksi dalam Meningkatkan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Traigan, U., & Lubis, A. A. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang*.
- Lubis, Y. A., & Batubara, B. M. (2020). *Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muda, I. (2012). *Mobilitas Pekerja Pembantu Rumah Tangga Dari Daerah Pinggiran Kota Medan*.
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). *Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara*.
- Sesilia, A. P. (2015). *Hubungan Antara Kompensasi dengan Loyalitas Kerja Karyawan di PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Sei Musam (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Jamil, B. (2010). *Peranan Marketing Dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Tamu dan Pendapatan Hotel*.
- Nasution, I. S. (2006). *Analisis Tentang Kebijakan Atas Pemberian Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kelahiran Catatan Sipil Gratis Terhadap keluarga Kurang Mampu Di Tanjungbalai Sebagai Upaya Peningkatan Pelayan Publik*.
- Tarigan, U., & Muda, I. (2013). *Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*.
- Siregar, N. S. S. (2002). *Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia*.
- Siregar, T., & Ritonga, S. (2005). *Penataan Kearsipan dalam Menunjang Kinerja Pegawai di Bagian Pembukuan Keuangan Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hasibuan, E. J., & Auza, A. (2023). *Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area terhadap Etika Kritik di Ruang Publik Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun Instagram@ Medantalk)*.
- Tarigan, U., & Siregar, N. S. S. (2004). *Peranan Motivasi Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Prasarana Wilayah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.